

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Agatha Uni Asmarani, *Berapa Jumlah Penduduk Indonesia Sebenarnya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Az. Nasution, *Hukum Perindungan Konsumen*, Daya Widya, Jakarta, 1995.
- H. Suherdi Sukandi, *Fungsi Dan Peranan Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen, Semiloka UUPK dan BPSK Kota Bandung*, Bandung, 2004.
- Gunawan Widjaja Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Hariwijaya Soewandi, Supartono Widyosiswoyo, *Ilmu Alamiah Dasar*, GhaliaIndonesia, Jakarta, 1991.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- J.M. van Dunne dan van der Burght, Gr, *Perbuatan Melawan Hukum, Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda Dengan Indonesia, Proyek Hukum Perdata*, Ujungpandang, 1988.
- LPPOM–MUI. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal*. Jakarta: LPPOM-MUI, 2008.

N.H.T.Siahaan, *Hukum Konsumen : Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*, Jakarta, 2005.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, 2004.

S. Sumarsono, (et.al), *Pendidikan Kewarganegaraan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

Soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum*, UI-press, 2007.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

## **2. Perundang-undangan**

Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pedoman Fatwa MUI

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 82 Menkes/SK/I/1996 yang direvisi No. 92/Menkes/SK/VII/1996 Tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan.

Keputusan Presiden No.90/ 2001 tentang Pembentukan BPSK

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.301 MPP/Kep./10/2001 tanggal 24 Oktober 2001 tentang Pengangkatan

dan Pemberhentian Anggota dan Sekretariat BPSK.(Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.302 MPP/Kep./10/2001 tanggal 24 Oktober 2001 tentang Pendaftaran LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat).

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.350/MPP/Kep./12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan Oleh Subekti, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 605/MPP/Kep./8/2002 tanggal 29 Agustus 2002 tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Pasal 29 Undang-Undang Dasar

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### **3. Sumber lain**

<http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-1352-BABI.pdf>

di akses pada tanggal 19 Maret 2017

<http://aries.wordpress.com/20011/02/16/ruu-jaminan-produk-halal-harus-sebagai-penyempurna> di akses pada tanggal 19 maret 2017

<http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-1352-BABI.pdf>  
di akses pada tanggal 19 Maret 2017

<http://aries.wordpress.com/20011/02/16/ruu-jaminan-produk-halal-harus-sebagai-penyempurna> di akses pada tanggal 21 maret 2017

[https://id.wikipedia.org/wiki/LPPOM\\_MUI](https://id.wikipedia.org/wiki/LPPOM_MUI), diakses pada pukul 03.05, pada tanggal 11 april 2017

<http://www.blogster.com/khaerulhtanjung/pelaku-usaha-dan-tanggung-jawab>. Diakses pada tanggal 16 Juni 2017

<http://www.riau1.kemenag.go.id>